PARTISIPASI RELAWAN DALAM PEMERINTAH DAERAH
(Studi Tentang Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Filsafat Politik Islam

Oleh:

AHMAD FAIZIN
NIM: E04212014

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

JANUARI 2019

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Faizin

NIM : E04212014

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Judul : **PARTISIPASI RELAWAN DALAM PEMERINTAH DAERAH (Studi Tentang Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar sarjana yang saya peroleh.

Surabaya, 06 Januari 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
72644AFF062612148
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Faizin
(E04212014)

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama	: Ahmad Faizin
NIM	: E04212014
Jurusan	: Filsafat Politik Islam
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat
Judul	: **PARTISIPASI RELAWAN DALAM PEMERINTAH DAERAH (Studi Tentang Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 06 Januari 2019

Pembimbing,

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
(NIP: 197202062007101003)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini oleh Ahmad Faizin telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kamawi M.Ag

NIP: 196409181992031002

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag,M.Si

NIP: 197202062007101003

Sekretaris,

Holilah, S.Ag, M.Si

NIP: 197610182008012008

Penguji I

Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si

NIP: 197411102003121004

Penguji II

Dr. Ismail, MH, S.Sos, M.Si

NIP: 196005211986081001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Faizin
NIM : E04212014
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Filsafat Politik Islam
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PARTISIPASI RELAWAN DALAM PEMERINTAH DAERAH (Studi Tentang Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Januari 2019
Penulis

(AHMAD FAIZIN)

ABSTRAK

Judul pada penelitian ini adalah *Partisipasi Relawan dalam Pemerintahan Daerah (Studi Tentang Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021)*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana partisipasi relawan Sayap 30 dalam mengawal realisasi 22 janji politik bupati Jember 2016-2021? 2) Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat Jember dengan adanya pengawalan terhadap janji-janji politik bupati Jember 2016-2021 oleh sayap 30?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi relawan Sayap 30 dalam mengawal realisasi 22 janji politik bupati Jember 2016-2021 serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat Jember dengan adanya pengawalan terhadap janji-janji politik bupati Jember 2016-2021 oleh sayap 30. Metode yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berbasis studi kasus dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Teknik analisis data memakai analisis kualitatif yang terdiri dari, penyajian data serta verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Relawan Sayap 30 merupakan relawan politik yang tidak hanya digunakan untuk pemenangan Pemilu, tapi juga untuk mengawal realisasi 22 janji politik bupati Jember 2016-2021. 2) Masyarakat Jember merasakan dampak positif dengan adanya relawan Sayap 30 yang digunakan oleh bupati Jember untuk mengawal realisasi 22 janji politik bupati Jember 2016-2021.

Kata kunci: Partisipasi Politik (Relawan Sayap 30), Janji Politik, & Pemerintah Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

BAB II KAJIAN TEORI 14

A. Partisipasi Politik 15

1. Pengertian Partisipasi 15

2. Pengertian Partisipasi Politik 18

3. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 21

B. Pengertian Relawan 22

C. Kajian Terdahulu 24

BAB III METODE PENELITIAN 28

A. Pendekatan Penelitian 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jenis Penelitian 28

C. Fokus Penelitian 29

D. Sampel Penelitian 29

E. Lokasi Penelitian 31

F. Sumber Data dan Jenis Data 31

1. Data Primer 31

2. Data Sekunder 32

G. Metode Pengumpulan Data 32

1. Metode Observasi 32

2. Metode Wawancara 33

3. Metode Dokumentasi 33

H. Teknik Analisis Data 33

I. Tahapan-tahapan Penelitian 35

J. Teknik Keabsahan Data 37

K. Triangulasi 38

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 39

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 39

1. Letak Geografis Kabupaten Jember 39

2. Administrasi Kabupaten Jember..... 41

3. Sejarah Kabupaten Jember 41

4. 22 Janji Politik dr. Faida dan KH. Muqit 43

B. Profil sayap 30 47

1. Latar Belakang Terbentuknya Sayap 30 47

2. Tujuan Terbentuknya Sayap 30 48

3. Struktur Sayat 30 48

C. Partisipasi relawan sayap pada pemilihan bupati jember 2016-2021..... 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Bentuk Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji politik Dr. Faida dan KH.Muqit Sebagai Bupati Jember 2016-2021..... 54

1. Bentuk partisipasi relawan sayap 30 dalam kinerja pemerintahan Jember 56

2. Janji-janji politik yang terealisasi 57

E. Dampak yang Dirasakan oleh Masyarakat Jember dengan Adanya Pengawalan Terhadap Realisasi Janji Politik oleh Sayap 30 60

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung telah menuntun pemimpin untuk secara konsisten menjalin hubungan dengan konstituen yang salah satunya diwujudkan melalui optimalisasi anggaran daerah bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa keunggulan Pilkada dengan model demokratis secara langsung sebagaimana diterapkan di Indonesia sejak 2004 melalui Pilpres dan Pilkada 2005. Pertama, melibatkan partisipasi masyarakat/ konstituen secara luas, sehingga dapat akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pilkada. Kedua, terjadinya kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah lokal. Ketiga, memberi ruang dan pilihan terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang berkualitas (memiliki kapasitas, integritas dan komitmen yang kuat) dan legitimate di mata masyarakat. Pilkada langsung juga berperan bagi pengembangan demokrasi, partisipasi publik, dan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi.Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalakan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2014 lalu. Pemilihan Umum yang pertama dilaksanakan pada masa OrdeBaru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII.[1] Setelah masa Pemilu Orde Lama, Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan keiskusertaan sepuluh partai.[2] Setelah serangkain pemilu yang 'dikuasai' oleh Orde Baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar. Fase reformasi membawa Indonesia pada Pemilu 1999, dimana partai dikembalikan pada fungsi awalnya. Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Setelah pelaksanaan pemilu dengan sistem pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009, diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan pada beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya. Terakhir, pemilu diadakan pada April 2014 untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah dan pada bulan Juli 2014 untuk pemilihan Presiden dengan berbagai perbaikan sebagai hasil dari evaluasi terhadap pemilu sebelumnya termasuk pada 2009 yang ternyata memendam banyak persoalan.

Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

[1] Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia,1981). Hal. 307
[2] Kemenkumham. *Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.9 No.4* Desember 2014. Hal.509.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup pemilu kepala daerah), Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[3] Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.

Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam stuktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang terdiri atas 508 kabupaten (pedesaan) dan kota (perkotaan), 6.994 kecamatan, dan 81.253 kelurahan (perkotaan) dan desa (pedesaan).[4]

Berdasarkan jenjang waktunya, Pemilu Presiden dan legislatif dilaksanakan setiap lima tahun. Berbeda dengan pemilu pada tingkat pusat,

---

[3] Rumah Pemilu.2014. "Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014". Diakses pada http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia.

[4] Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014*..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan eksekutif tingkat subnasional atau daerah (Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada) dilaksanakan secara terputus berdasarkan masa jabatan atau alasan lain sesuai ketentuan undang-undang. Halini membuat pengadaan pemilu dilakukan hampir setiap hari di Indonesia. Di samping pengadaan pemilu yang berjenjang, dalam hal jumlah elektorat, pemilu di Indonesia adalah pemilu-satu-hari kedua terbesar di dunia –setelah Amerika Serikat. Kategorisasi terbesar didasarkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yakni sekitar 237,56 juta jiwa. Jumlah terbesar tersebut didorong pula oleh ketentuan keikusertaan dalam pemilu. Di mana batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (pada hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah atau pernah menikah.hal ini berbeda misalnya dengan ketentuan pemilih di negara lain yang biasanya di tingkat usia 21 tahun. Daftar pemilih Pemilu 2014 saja berdasarkan data pemilih sementara sebelum Pemilu 2014 dilakukan berjumlah 187.977.268 pemilih. Meski demikian, partisipasi dalam pemilu tidak sebesar atau seratus persen dari dafatar tersebut. Dari besaran jumlah pemilih, untuk Pemilu 2009 yakni 171 juta pemilih terdaftar, hanya 122 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sebesar 71 %. Sedangkan pada Pemilu 1999 dan 2004 masing-masing besaran partisipasi mencapai 93 % dan 84 %.[5]

Dalam dokumen Libtang Kompas, Pemilu Indonesia dianggap sebagai kegiatan kepemiluan paling kompleks di dunia. Hal ini dikarenakan berdasarkan data yang dimiliki Kompas, untuk setiap pemilu ada empat juta petugas di

[5] Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014*..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

550.000 TPS, yang tersebar di berbagai penjuru sebuah negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan 19.700 kandidat dalam satu Pemilu presiden dan 532 dewan perwakilan di tingkat nasional dan daerah.[6]

Pemilu Indonesia yang kompleks tidak lepas dari eksistensi partai politik. Indonesia sendiri sejak awal berdirinya telah mengenal partai sebagai wadah perjuangan melawan kolonialisme. Ada berbagai macam partai dengan berbagai macambasis ideologi, dari religius, nasionalis bahkan komunis.[7] Eksistensi partai yang beragam tersebut terus ada hingga kini dimana Indonesia menganut sistem multi partai. Menurut catatan Kementrian Hukum dan Hak pada Pemilu 2009, terdapat 38 partai politik nasional dan enam partai politik Aceh yang bersaing hanya untuk daerah Aceh. Namun, hanya ada sembilan partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. Setelah Pemilu 2009, standar keikustsertaan pemilu direvisi dan menghasilkan aturan baru bagi legalitas partai. Dimana partai politik harus memiliki kantor cabang (yang sifatnya permanen) di 33 provinsi, kantor cabang (yang sifatnya permanen) di setidaknya 75 persen kabupaten/kota tiap provinsi, dan kantor cabang (tidak harus permanen) di setidaknya 50 persen kecamatan dalam kabupaten atau kota tersebut. Berdasarkan aturan itulah, pada Pemilu 2014, dari 46 partai politik yang mendaftarkan diri, hanya dua belas partai politik nasional dan tiga partai politik lokal (Aceh) yang berhasil lolos dalam pemilu.

---

[6] Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014..*
[7] Kemenkumham. Kemenkumham. *Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.9 No.*4 Desember 2014. Hal.509

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam segi kelembagaan, sistem pemilu di Indonesia ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). KPU merupakan lembaga konstitutional yang bekerja secara independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan lokal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Ketua dan anggota KPU pusat terdiri dari 7 anggota yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan kemudian dilantik oleh Presiden untuk jangka waktu lima tahun. Begitupula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipilih melalui proses seleksi dan dilantik oleh presiden dengan keanggotaan pada tingkat nasional sebanyak 5 orang.[8] Mereka bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU dan keseluruhan proses pemilu dari pra hingga pasca.

Secara khusus untuk Pemilu Presiden yang dipilih sebagai kepala negara dan pemerintahan, pemilihan dilakukan pula secara langsung. Dimana calon presiden dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun. Calon presiden mendaftarkan diri setelah resmi diusung oleh partai politik. Ketentuannya, sebuah partai politik atau koalisi partai politik baru bisa mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden jika memenangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR. Oleh karena itu, sebelum Pemilu Presiden diadakan, terlebih dahulu diadakan Pemilu legislatif. Adapun Pemilu Presiden dilakukan dalam dua putaran. Jika seorang calon tidak mencapai mayoritas suara absolut pada putaran pertama,

[8] Rumah Pemilu. Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014. Diakses pada http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dilaksanakan putaran kedua antara dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Dalam sejarah Pemilu Presiden langsung, Mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, terpilihdua kali yakni pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dengan perolehan 60,8 persen jumlah suara.[9]

Pada saat pesta pemilihan kepala daerah dimulai, pada saat itulah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah mulai berkampanye memberikan janji-janji politik kepada masyarakat dengan harapan agar masyarakat mau memilih mereka menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Partai politik dan kandidat perseorangan berlomba mengeluarkan janji-janji politik sebagai strategi kampanye untuk mendapatkan dukungan politik dalam Pemilu. Janji-janji politik bertujuan membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah secara umum mendukung dengan berbagai dimensinya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu.

Akan tetapi setelah mereka, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan menduduki jabatannya, mereka sering lupa dengan janji-janji politik yang pernah mereka berikan kepada masyarakat. Pada akhirnya masyarakatlah yang dirugkan dan kecewa ketika mereka tidak menepati janji atau melaksanakan janji politiknya yang pernah mereka janjikan.

Di dalam pertarungan Pilkada janji-janji politik kerap dicap sebagai arena kotor, karena pemerannya kerap umbar janji. Janji diumbar untuk meraih kekuasaan, tetapi dilupakan begitu saja setelah kekuasaan digenggam. Hal ini

[9] Rumah Pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat sekiranya janji-janji yang diucapkan oleh kandidat sebelum pemilihan bisa direalisasikan setelah kandidat itu terpilih. Masyarakat bisa mengawal dan mengingatkan manakala janji-janji itu terlupakan.

Dalam politik praktis, seringkali politisi menjadikan visi-misi sebagai lipservices (buah bibir) tanpa makna baik bagi perubahan kehidupan masyarakat. Visi-misi hanya dijadikan sebagai senjata sesaat untuk meraih simpati rakyat. Seringkali visi-misi yang diusung hanya disusun begitu saja tanpa kajian mendalam, pertimbangan rasional, dan tidak ber dasarkan data-data riil yang terkait dengan kehidupan masyarakat dan pembangunan. Visi-misi disusun sepihak oleh para politisi, gagasan dan idenya belum tentu searah dengan ke butuhan masyarakat sebagai sasaran dari visi itu.[10]

Tidak adanya aturan baku yang mengatur bahwa para kandidat yang terpilih harus menunaikan janji politiknya saat kampanye, membuat masyarakat tidak memiliki wewenang untuk mengawal janji-janji politik yang telah dijanjikan. Saat kandidat yang terpilih tidak melaksanakan janjinya, masyarakat tidak bisa memaksakan agar janji tersebut dipenuhi. Sehingga kandidat terpilih cenderung mengabaikan apa yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengawal janji politik para pemimpin adalah dengan memanfaatkan peran relawan untuk mengawal janji-janji politik yang telah disampaikan pada saat mereka kampanye.

---

[10] Jainuri, dkk. *Catatan Politik Ditahun Politik.* (Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2014). 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2015 kabupaten Jember telah melangsungkan pesta demokrasi yang dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 2 yaitu dr. Faida dan Abdul Muqit Arief. Berdasarkan perhitungan manual, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember nomor urut 2 unggul dengan perolehan suara sebanyak 525.519 suara dari 977.604 suara sah. Sedangkan paslon nomor urut 1, Sugiarto–Dwi Koryanto mendapatkan 452.085 suara. Dengan mengusung konsep 22 janji politik, pasangan dr. Faidah dan Abdul Muqit Arief unggul dengan perolehan suara 53,76 persen suara. Sedangkan pasangan Sugiarto-Dwi Koryanto hanya mendapatkan 46,24 persen suara.

Pada pemilihan bupati Jember saat itu, kemenangan pasangan calon dr. Faidah dan Abdul Muqit Arief tidak lepas dari peran relawan Sayap 30. Relawan Sayap 30 merupakan sebuah tim yang terbentuk di Jember sejak tahun 2014.[11]

Dengan jumlah 30 orang yang berasal dari berbagai kecamatan di kabupaten Jember, tim ini bergerak disegala bidang untuk membantu percepatan pembangunan di kabupaten Jember secara khusus. Relawan Sayap 30 tidak memiliki kontrak politik dengan dr. Faida pada saat pemilihan bupati Jember tahun 2015.

Menariknya, relawan Sayap 30 tidak sama dengan relawan pada umumnya. Kebanyakan relawan membubarkan diri setelah pemilihan selesai. Namun sayap 30 terus dilibatkan oleh dr. Faida hingga saat ini. Relawan ini membantu dr. Faida tidak hanya pada saat pemilihan tapi juga setelahnya untuk mengawal kepemimpinan dr. Faida. Menurut Tim Pemenangan dr. Faida, relawan

[11] Wawancara dengan Tim Relawan Sayap 30 Bapak Fathurrosi,SE pada tanggal 16 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dilibatkan dalam proses realisasi janji politik yang telah dikampanyekan, agar dalam pelaksanaannya, janji politik yang telah disampaikan tepat sasaran.[12]

Peran relawan Sayap 30 begitu sentral dalam membantu bupati dr. Faida, terutama saat 22 janji politik tersebut akan direalisasikan di lapangan supaya tepat sasaran dan berdampak signifikan, tidak sekedar menunaikan sebuah program secara sembarangan karena terikat janji saat kampanye.

Adapun program yang telah direalisasikan di kabupaten Jember dengan melibatkan pengawalan sayap 30 diantaranya ialah:

1. Adanya Ambulans di setiap desa se-Kabupaten Jember 50% sudah terealisasi.
2. Pemberian honor guru ngaji dan dibuatkan rekening untuk pengambilan honor disetiap tahunnya serta peningkatan sebesar 3 (tiga) kali lipat honor guru mengaji dan bantuan untuk guru PAUD.
3. Pemberian asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji.
4. Adanya pemberian kartu KIS kepada masyarakat yang kurang mampu.
5. Pemberian honor sekaligus dibuatkan rekening kepda seluruh RT/RW se-kabupten Jember.
6. Pemberian beasiswa kepada anak guru ngaji.
7. Pembenahan infrastuktur dengan melakukan pengaspalan, memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi hingga ke pelosok desa.
8. Pemberian layanan kesehatan gratis untuk masyarakat dan operasi gratis bagi Duafa.

[12] Wawancara dengan Tim Relawan Sayap 30 Bapak Nuhasan,SPd.I pada tanggal 21 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, untuk mengetahui seperti apa relawan Sayap 30 dan bagaimana perannya dalam mengawal realisasi 22 janji politik bupati Jember, maka penelitian ini dilakukan dengan judul penelitian "Partisipasi Relawan dalam Pemerintah Daerah (Studi Tentang Partisipasi Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi relawan Sayap 30 dalam mengawal realisasi 22 janji politik bupati Jember 2016-2021?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat Jember dengan adanya pengawalan terhadap janji-janji politik bupati Jember 2016-2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui partisipasi relawan Sayap 30 dalam proses realisasi 22 janji politik bupati dr. Faida di kabupaten Jember.
2. Mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat Jember dengan adanya pengawalan terhadap realisasi 22 janji politik bupati dr. Faida di kabupaten Jember oleh Sayap 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi tidak hanya dalam tataran teoritik, tetapi juga dapat memberikan kontsribusi yang aplikatif pada tataran praksis.

1. Manfaat Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi bagi pengayaan pemikiran politik terhadap relawan politik dalam bepartisipasi pada pemerintah daerah kabupaten Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi: a) Relawan Sayap 30 kabupaten Jember dalam bepartisispasi pada pemerintah daerah kabupaten Jember serta mengevaluasi kinerjanya. b) Para pemangku kebijakan sebagai pemimpin yang mengelola pemerintahan di daerah dalam melibatkan relawan guna merealisasikan janji politiknya. c) Para peneliti berikutnya sebagai referensi mengenai partisipasi relawan dalam merealisasikan janji politik pemerintah daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Salah satu konsepsi modern diajukan oleh Joseph Scumpeter[1] yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanaan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan pengejewantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Dapat kita lihat dari pengertian demokrasi tersebut secara normatif, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.[2]

---

[1] Joseph Scumpeter , *Capitalism, Socialism, and Democracy* (New York: Harper, 1947).
[2] Mochtar Mas'oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa inggris, *partisipate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksitensi manusia seutuhnya, tuntutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipasif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas dan dianggap layak dipercaya untuk dapat dilaksanakan program pembangunan secara efektif dan efesien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efesien.

Dalam tata pemerintahan yang baik konsep partisipasi diyakini sebagai suatu pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberhasilan dari pemerintahan yang demokratis, penyelenggaraan bangunan yang berorientasi kerakyatan dan terciptanya keadilan sosial. Pilohan ini mengandung konsensi dengan menguatkan partisipasi masyarakat disatu sisi dan disisi lain pemerintah harus berperan sebagai wahana untuk masyarakat yang berbeda atau saling bertentangan.[3] Menurut tokoh Mardikanto dan Poerwoko Soebianto partisipasi didefinisikan sebagai keikutsertaan seorang atau kelompok anggota masyarakat dalam satu kegiatan. [4]

Siti Irene dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi degan mengutip pendapat dari Cohen dan Uphoff mengenal pengertian partisipasi, mendifinisikan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan,pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program. Jadi partisipasi masyarakat dapat dikatan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu hal atau program yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Keterlibatan tersebut berupa kontribusi dalam kegiatan yang telah diputuskan serta bersama-sama memanfaatkan hasil program tersebut.

---

[3] Suhendar, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program PNPM Mandiri* (Skripsi Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang, 2012), 41

[4] Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Hutington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.[5]

Menurut Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengahadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan

[5] Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Nomor 3, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Pengertian partisipasi politik menurut pendapat para ahli:

1) Keith Fauls memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.
2) Herbert McClosky memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
3) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries Huntington dan Nelson (1997: 3) partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.[6]

Dari pendapat yang dikemukankan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan

[6] Ibid., 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (violence).

Namun dalam realitas politik masyarakat saat ini, partisipasi politik belum sepenuhnya berjalan maksimal hal ini disebabkan oleh kompleksnya struktur kemasyarakatan dan dan struktur politik dengan aturan-aturan main yang irrasional sebab operasionalnya sering menjarah, menekan dan memaksa, ditambah lagi kebutaan politik massa rakyat. Sehingga banyak orang yang masih belum tahu hak-hak politiknya, disamping ketidak mampuannya untuk mengontrol dan memberikan pengaruh terhadap lembaga-lembaga politik formal yang ada. Maka yang terjadi pada masyarakat ialah peranan sebagai konsumen politik yang pasif dan mengambang, tanpa mengerti dimana dan bagaimana bentuk peranan dan status politiknya ditengah hiruk-pikuk kegiatan politik.[7]

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada

[7] Kartini Kartono, *Pendidikan Politik; Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Cet-III, Desember. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

3. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Secara umum bentuk-bentuk partisipasi sebagai kegiatan dibedakan sebagai berikut :

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap system politik yang ada telah menyimpang dari apa yang di cita-citakan.

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor "kebiasaan" partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:[8]

[8] Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

B. Pengertian Relawan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *relawan* berasal dari kata sukarelawan yang artinya orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena diwajibkan atau dipaksakan).[9] Dalam bahasa Inggris kata relawan disebut *volunteer* yang berarti sukarelawan atau pekerja sukarela.[10]

Dengan demikian relawan adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu. Selain itu kegiatan yang dilakukan relawan bersifat sukarela untuk menolong orang lain tanpa adanya harapan akan imbalan eksternal. Kerelawanan adalah aktivitas memberikan waktu secara cuma-cuma untuk memberikan bantuan kepada orang lain, kelompok, atau suatu organisasi.

Peran relawan dalam politik tidak dapat dianggap remeh. Ia memiliki peran besar dalam membangun basis dukungan untuk memenangkan para peserta yang diusung. Menurut Savirani (2015) relawan politik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. *Pertama***,** relawan yang berasal dari mantan aktivis yang terlibat dalam kisaran tahun 1990-an atau lebih dikenal sebagai aktivis gerakan pro-demokrasi untuk menggulingkan rezim Soeharto. *Kedua***,** adalah aktivis dari berbagai organisasi non-pemerintah mulai dari gerakan anti-korupsi, petani dan kelompok masyarakat adat. *Ketiga***,** adalah seniman dan orang-orang di sektor kreatif.[11]

---

[9] Tim Redaksi Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: 2008), 1544

[10] John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Agama, 2006), 632

[11] Mangku Alam, dkk. *Relawan: Dari Gerakan Sosial ke Proyek Politik.* https://osf.io/bzk6x/download /?version=1&displayName...2017-12...549Z.pdf. (Kamis, 7 Februari 2019, 8.00)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan kerelawanan biasanya didorong oleh nilai moral atau harapan tertentu dari individu. Motivasi untuk menjadi relawan meliputi harapan akan adanya manfaat dari kegiatan tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak orang-orang berpendidikan yang berpartisipasi didalam sebuah kerelawanan ketimbang mereka yang kurang (berpendidikan) (Wilson & Musick, 1999). Pernyataan ini juga didukung oleh Mutchler, Burr & Caro (2003), bahwa mereka yang berpendidikan memiliki jaringan yang lebih luas, kemampuan kognitif yang baik, serta memiliki nilai-nilai yang dapat membuat mereka berafiliasi kepada kelompok-kelompok relawan.

C. Kajian Terdahulu

Kajian terdalu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang telah diungkap dan aspek penelitian yang belum diungkap. Maka diperlukan adanya kajian terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu langkah ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap kasus yang sama. Adapun hasil penelitian kajian terdahulu sebagaimana di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anida dengan judul skripsi "Keterlibatan Komunitas pada Pilkada di Kabupaten Soppeng Tahun 2015".[12] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan komunitas pemuda 72 yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memenangkan pasangan A. Kaswadi Razak-

[12] Nur Aida. "Keterlibatan Komunitas pada Pilkada di Kabupaten Soppeng Tahun 2015" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supriansa pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Soppeng tahun 2015. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif analisis dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komunitas dalam memenangkan pasangan calon A. Kaswadi Razak dan Supriansa pada Pilkada adalah adanya kerjasama antara komunitas yang satu dengan yang lain, terbentuknya komunitas yang begitu banyak berpotensi terjadinya konflik, akan tetapi komunitas mampu meredam hal tersebut dengan menjalin solidaritas sosial antara sesama anggota maupun masyarakat. Untuk lebih memaksimalkan partisipasi politik dengan adanya kesadaran tanpa ada kontrak politik didalamya. Komunitas tersebut juga melakukan peran dalam lingkup eksternal yang mampu menjaga agar tidak terjadi money politik, mensosialisasikan visi dan misi calon serta berperan sebagai relawan dengan menyarankan masyarakat memilih untuk memaksimalkan dukungan kepada calon tanpa ada unsur paksaan didalamnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arimbi Sinulingga dengan judul skripsi "Peranan Relawan Demokrasi Terhadap Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Deli Serdang".[13] Penelitian ini menguraikan program relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2014. Hal ini dilatarbelakangi oleh penurunan kualitas memilih, sebagian pemilih tidak

[13] Arimbi Sinulingga. "Peranan Relawan Demokrasi Terhadap Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Deli Serdang" (Skripsi tidak diterbitkan, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Fenomena yang terjadi pada pemilih ini sebagian dikarenakan oleh tingkat pemahaman politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi. Teori yang digunakan dalam menjelaskan penelitian ini adalah Teori Kebijakan Publik untuk melihat bagaimana dasar hukum dan bagaimana implementasi dalam pembentukan relawan demokrasi, teori partisipasi politik untuk melihat bagaimana relawan demokrasi sebagai warga sipil ikut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penilitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan relawan demokrasi belum mencapai hasil maksimal, hal ini dikarenakan kendala yang mereka hadapi dilapangan tidak seperti yang dibayangkan. Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tidak semudah yang dipikirkan, apalagi masyarakat yang cenderung membiasakan dirinya untuk tidak terlibat dalam pemilu ternyata sulit menyadarkannya. Hal ini juga diperparah dengan kondisi Deli Serdang yang mempunyai cakupan wilayah yang sangat luas, tentu saja 25 orang dirasa tidak akan cukup dalam melaksanakan sosialisasi yang merata.

Dari dua kajian terdahulu di atas, dapat kami simpulkan bahwa penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesamaan objek penelitian yaitu relawan politik. Walau memiliki kesamaan, ada beberapa hal yang membedakan dengan keduanya yaitu:

1. Dengan penelitian pertama, relawan politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah relawan Sayap 30 yang tidak hanya menjadi relawan untuk pemenangan pada saat pemilu, tapi juga relawan yang senantiasa dilibatkan dalam proses relisasi janji politik setelah pemilu selesai.
2. Sedang untuk penelitian kedua, penelitian ini jauh berbeda, karena relawan yang ada pada penelitian ini adalah relawan independen yang tidak berkaitan dengan lembaga negara. Tapi relawan yang dibentuk atas inisiatif masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Jember serta memaksimalkan kebijakan yang tepat sasaran dan pengawalan terhadap realisasi janji-janji politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendektan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif karena mempunyai tiga alasan yaitu: Pertama, lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda. Kedua, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

Sedangkan menggunakan pendekatan deskriptif, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Jadi, melalui pendekatan deskriptif ini agar penelitian mampu mendeskripsikan tentang partisipasi relawan Sayap 30 dalam mengawal realisasi 22 janji politik bupati Jember 2016-2021.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.[1] Adapun bentuk penelitiannya adalah

[1] Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2005),4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan hanya bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau setatus fenomena dalam situasi tertentu.

C. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian ini tidak terlepas dari konsep bahwa membatasi diri kepada sekelompok orang yang terkait bahkan sebagai pelaku dalam kasus terkait. Pendalaman terhadap alasan-alasan mengapa perprilaku atau bertindak, berfikir, berpendapat dan memberikan manfaat bagi penelitinya. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang hanya sebagai informasi, walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Berdasarkan latar belakang, dari masalah dan tujuan peneliti, maka fokus penelitian ini adalah:

a) Bagaimana bentuk partisipasi relawan Sayap 30 dalam mengawal realisasi 22 janji politik bupati Jember 2016-2021.
b) Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat Jember dengan adanya sayap 30 sebagai pengawal janji politik bupati Jember 2016-2021.

D. Sampel Penelitian

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.[2]

Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses daripada produk dan biasanya membatasi pada suatu kasus. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sempel sumber data dengan pertimbangan tertentu.[3] Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sempel diambil berdasarkan kebutuhan peneliti.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

NO.	SUMBER INFORMAN	JUMLAH
1.	DPRD Kabupaten Jember	1 orang
2.	Perangkat Desa yang dipilih secara acak disetiap Kecamatan	5 orang
3.	Ketua Kordinator Sayap 30	1 orang
4.	Pendiri Sayap 30	1 orang

[2] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 223
[3] Ibid., 298

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Ketua RT	1 orang
6.	Masyarakat dipilih secara acak	5 orang

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Jember, provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Dan Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Lumajang di sebelah barat. Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan. Kabupaten Jember terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur.

F. Sumber Data dan Jenis Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa instansi diantara lain sebagai berikut.

- Drs. H. Masrur,M.Si DPR Jember, untuk menilai kinerja dan seberapa efektif partisipasi relawan Sayap 30 dalam mengawal realisasi janji politik bupati Jember 2016-2021.
- Beberapa Kepala Desa yang pernah merasakan dampak atau partisipasi dari relawan sayap 30.
- Selamet Efendi S.Pd.I sebagi kordinator sayap 30 (kami ambil kordinatornya agar sumber data yang kami terima lebih akurat dan mendalam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.[4] Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survei studi historis, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan koordinator relawan sayap 30.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto, observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Obsevasi dapat dilakukan dengan tes, kusioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.[5]

Terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang

[4] Lexy J. Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 236

[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 156-157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Partisipasi relawan sayap 30 dalam mengawal janji-janji politik Dr. Faida sebagai bupati Jember 2016-2021.

b) Bentuk-bentuk realisasi program yang di kawal oleh relawan sayap 30.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan subyek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Sebagaimana pebdapat Sutrisno Hadi, bahwa wawancara harus dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[6] Jenis data yang digali dengan metode ini meliputi seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan sumbernya terdiri dari informan sebagimana disebutkan di atas.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data yang menyelidiki bagan, strukutr Organisai, grafik, arsip-arsip, foto dan lain-lain

H. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data kualitatif yang akan mencoba memahami fenomena atau gejala yang dilihat sebagaimana adanya. Penulis disini menggunakan teknik analisi deskriptif dimana data yang peneliti peroleh kemudian diuraikan dan disusun serta dianalisis. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduction, display, dan conclusion drawing atau verification.

[6] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Dalam analisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan data secara sistematis, ringkas dan sederhana tentang peranrelawan sayap 30 untuk mengawal kinerja bupati jember sehingga lebih mudah dipahami oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (data reduction)

   Reduksi data adalah merupakan analisis data yang menggolongkan data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat di tarik kesimpulan (verifikasi). Data yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis disetiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu perlu di direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh.

2. Penyajian Data (*data display*)

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yaitu mengumpulan data atau informasi secara tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naratif, selain itu bisa juga bersifat matriks, grafik, dan chart. Penyajian data dilakukan dengan alasan supaya peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan. Selain itu juga supaya peneliti mudah dalam memahami yang telah terjadi dan dapat merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Verifikasi (*verification*)

Verifikasi merupakan rangkaian analisis data pucak.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung.Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk diambil sebuah kesimpulan.

I. Tahapan-tahapan Penelitian

Diantara tahap-tahap penelitian yang dikemukakan oleh Kirk dan Miller ada empat tahapan yaitu: tahap invention, discovery, interpretation, eksplanation,Dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mengeksplorasi tentang penyebab serta factor apa saja yang mempengaruhi relawan sayap 30 begitu inten untuk mengawal janji-janji kampanye dr. H. Faida selama satu priode, peneliti ini memilih tahapan penelitian sebagaimana yang dilakukan oleh Kirk dan Miller, yaitu sebagai berikut:

1. *Invention* (tahap pra lapangan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap pra lapangan adalah merupakan orientasi guna untuk memperoleh gambaran mengenai latar belakang penelitian dengan menggunakan grand tour observation.Adapaun tahapan-tahapannya yang diidentivikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a) Menyusun pelaksanaan penelitian
b) Memilih lapangan
c) Mengurus permohonan penelitian
d) Memilih dan memanfaatkan informasi
e) Mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan penelitian[7]

Tahap ini dilakukan sejak dini yaitu sejak pertama kali atau sebelum terjun ke lapangan dalam rangka penggalian data. dalam penelitian ini peneliti mencari data informasi mengenai "Penyebab serta factor apa saja yang mempengaruhi relawan sayap 30 begitu inten untuk mengawal janji-janji dr. H. Faida selama satu priodesesuai dengan kosentrasi jurusan dari beberapa informan.

2. Tahap pekerjaan lapangan (*Discovery*)

Dalam tahap ini peneliti memasuki lapangan untuk kemudian melihat, memantau, meninjau lokasi penelitian di Kabupaten Jember melalui tahapan - tahapan sebagai berikut:

a) Permohonan surat pengantar dari pihak Akademik fakultas ke Bakesbangpol Jawa Timur.
b) Permohonan surat izin penelitian dari Bakesbangpol Jawa Timur.

[7] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 127-133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Permohonan surat izin penelitian dari Bakesbangpol Kabupaten Jember.

d) Pembuatan jadwal wawancara dengan kordinator sayap 30 di Kabupaten Jember.

e) Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggali data dari Beberapa Birokasi Mulai Dari tingkatan Bupati, DPR Sampai Tingkat Desa Dan Keluraahan di Kabupaten Jember. .Pencarian data dilapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang telah disediakan secara tertulis, rekaman ataupun dokumentasi.[8] Perolehan data berdasarkan proses tersebut kemudian dicatat dengan cermat, argument atau komentar informan sebagai obyek penelitian.

J. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan dapat dilakukan dengan triangulasi pendekatan dengan kemungkinan melakukan trobosanmetodologisterhdap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan. Hingga kemudia dibentuk teknik pengujian keabsahan data yang diberi nama dengan teknik pemeriksaan.

1. Perpanjangan Pengamatan : Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan informan yang pernah maupun baru ditemui. Melalui perpanjangan pengamatan, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab,

[8] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin terbuka dan saling mempercayai. Dengan demikian tidak ada informan yang disembunyikan lagi.[9]

2. Meningkatkan Ketekunan : meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan bersinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat di rekam secara pasti dan sistematis.

K. Triangulasi

triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sugiono memaparkan teriangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian.[10]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber teknik. Peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber (informan), hingga data tersebut bisa dinyatakan benar (valid) dan juga melakukan observasi serta dukumentasi diberbagai sumber.

---

[9] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kualitati dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2008), 270-271

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Jember

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Jember, provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Dan Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Lumajang di sebelah barat. Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan. Kabupaten Jember terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur.

Jember dahulu sempat memiliki kota administratif, namun sejak tahun 2001 istilah kota administratif dihapus, sehingga Kota Administratif Jember kembali menjadi bagian dari Kabupaten Jember. Hari jadi Kabupaten Jember diperingati setiap tanggal 1 Januari.

Jember memiliki luas 3.293,34 Km2 dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23oC - 32oC. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.[1]

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat minoritas Suku Osing dan Suku Jawa. Juga warga Tionghoa yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Madura dan Bahasa Jawa digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Madura dan Jawa di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember. Jember berpenduduk 2.929.967 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km$^{2.}$

Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Perkebunan yang dikelola oleh perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan perusahaan daera yaitu PDP (Perusahaan Daerah

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember (Kamis, 13 Desember 2018, 19.00)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkebunan). Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar/ kulit cerutu. Di pasaran dunia tembakau Jember sangat dikenal di Jerman dan Belanda.

2. Administrasi Kabupten Jember

Koordinasi Camat: 4

Kecamatan: 31

Dusun: 201

Rukun Warga : 4154

Rukun Tetangga: 14714

Lingkungan: 902

3. Sejarah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, 21 Agustus 1928.

Pemerintah Regenschap Jember yang semula terbagi dalam tujuh Wilayah Distrik, pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad No. 46/1941 tanggal 1 Maret 1941 Wilayah Distrik dipecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu:

- Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi, dan Arjasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, dan Sukowono.
- Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli, dan Jenggawah.
- Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari, dan Tempurejo.
- Distrik Tanggul meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru, dan Bangsalsari.
- Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong Gumukmas, dan Umbulsari.
- Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, dan Balung.

Berdasarkan Undang Undang No. 12/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, ditetapkan pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (dengan Perda), antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976, dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut:

Kacamatan Jember dihapus, dan dibentuk tiga kecamatan baru, masing-masing Sumbersari, Patrang dan Kaliwates. Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi. Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, wilayah Kewedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa dengan wilayah kerja meliputi Arjasa, Pakusari, dan Sukowono yang sebelumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk Distrik Kalisat. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya, secara administratif Kabupaten Jember saat itu terbagi menjadi tujuh Wilayah Pembantu Bupati, satu wilayah Kota Administratif, dan 31 Kecamatan.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 sebagai tuntutan No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk penghapusan lembaga Pembantu Bupati yang kini menjadi Kantor Koordinasi Camat. Selanjutnya, dalam menjalankan roda pemerintah di era Otonomi Daerah ini Pemerintah Kabupaten Jember dibantu empat Kantor Koordinasi Camat, yakni:

Kantor Koordinasi Camat Jember Barat di Tanggul

Kantor Koordinasi Camat Jember Selatan di Balung

Kantor Koordinasi Camat Jember Tengah di Rambipuji

Kantor Koordinasi Camat Jember Timur di Kalisat

4. 22 Janji Politik dr. Faida dan KH. Muqit

Kabupaten Jember mencetak sejarah baru di pemerintahannya. Jember kini memiliki bupati perempuan untuk pertama kalinya. Bupati perempuan pertama di Jember ialah dr. Faida. Dia dilantik pada tanggal 17 bulan 2 tahun 2016. Faida yang berpasangan dengan Abdul Muquit Arief mempunyai 22 janji politik yang akan dicapainya selama lima tahun dalam kepemimpinannya.

22 janji politik tersebut dikenal dengan sebutan 22 Janji Kerja Fakta. Janji-janji tersebut untuk mewujudkan Jember Maju Iptek dan Imtaq, Jember Mandiri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jember Sehat, Jember Kuat dan Bersih, serta Jember Kota Wisata Berbudaya. Adapun rincian janji politik tersebut ialah:

1. Jember Maju Iptek dan Imtaq
    a. Sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK.
    b. Memberikan 5000 beasiswa perguruan tinggi bagi siswa berprestasi.
    c. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah/ Madrasah dan pondok pesantren serta memperkuat jaringan masjid pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik.
    d. Meningkatkan sebesar 3 (tiga) kali lipat honor guru mengaji dan meningkatkan bantuan untuk guru PAUD.
    e. Menjadikan Jember sebagai pusat embarkasi Haji wilayah Timur Indonesia.
    f. Memberikan asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jember Mandiri
   a. Meningkatkan kualitas infrastuktur dengan melakukan pengaspalan hingga ke pelosok, membangun dan memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi.
   b. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.
   c. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan koperasi.
   d. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian.
   e. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau.
   f. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan asuransi kerja untuk para nelayan.
3. Jember Sehat
   a. Memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua dan melakukan operasi gratis bagi Duafa.
   b. Membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layanan kesehatan yang mendekat ke masyarakat antara lain: merevitalisasi Puskesmas, menyediakan 3 dokter di setiap Puskesmas, Ambulans di setiap desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jember Kuat dan Bersih
   a. Membangun layanan usaha dan layanan publik satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja.
   b. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan PNS.
   c. Memperkuat kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui program satu desa satu dosen, mencairkan dana desa secara tepat waktu dan menyegerakan pelaksanaan UU desa dengan menerbitkan peraturan daerah dan peraturan bupati.
   d. Meningkatkan bantuan/ honor ketua RT/RW.
5. Jember Kota Wisata Berbudaya
   a. Mengembangn industri kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama.
   b. Merintis dan mengembangkan bandara Jember menjadi bandara komersial.
   c. Mengembangkan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman publik.
   d. Menjadikan Jember sebagai bumi shalawat yang ramah lingkungan, ramah warga berkebutuhan khusus, ramah ibu dan anak serta ramah kelompok minoritas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Profil sayap 30

1. Latar Belakang Terbentuknya Sayap 30

Profil relawan sayap 30 dua tahun sebelum pilbup (2013) aktifis-aktifis organisasi ingin membentuk relawan ,yang bertujuan untuk memenangkan dan mengawal calon-calon bupti yang mendapatkan rekomndasi dari kepengurusan relawan sayap 30 untuk memenangkan dan mengawal ketika proses pilkada dan pasca pilkada.

Adanya relawan ini bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, karna bupati sebelumnya menurut realawan dianggap gagal dalam memimpin kabupaten jember.

Secara geografis letak kabupaten Jember sangat menguntungkan, karena Kabupaten Jember memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti : tambang mas, budi daya ikan dan lahan pertanian yang bisas dikatakan luas juga subur yang sangat menguntunkan pada pendapatan Kabupaten Jember,

Ditinjau dari sejarah masyarakat Kabupaten jember yang mayoritas masyarakatnya bahkan hampir keseluruhan adalah pendatang dari suku Jawa dan Madura, oleh sebab itu Kabupaten Jember memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat kuat, karena terdapat akulturasi budaya dan tradisi Madura-jawa. Sedangkan Bupati sebelumnya tidak menyadari dan kurang perhatian mengenai hal itu, sehingga para relawan menganggapnya gagal dalam memimpin Kabupaten Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan Terbentuknya Sayap 30

Menanggapi masalah gagalnya bupati Kabupaten Jember dalam memaksimlkan dan memprhatikan masyarakat Jember secara keseluruhan, dan kurangnya menfungsikan kekayaan alam jember, maka Muhammad Muslim (pendiri sayap 30) membentuk sayap 30 guna mengawal masyarakat untuk memilih calon bupati yang direkomendasi sayap 30 dengan pertimbangan memilih pemimpin yang berkapasitas dan berintegritas dalam mengatasi permasalah-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemimpin-pemimin atau bupati sebelumnya yang oleh para relawan sayap 30 dianggap gagal.

3. Struktur Sayat 30

Pendiri : Muhammad Muslim, SH

Ketua : Selamet Efendi, S.Pd

Sekretaris : Fathur Rosi, S.E

Bendahara : Eva Nur Aini

Koordinator Perkecamatan:

1	Kecamatan Ajung	Moh. Husain, S.Ei.
2	Kecamatan Ambulu	Saiful Bahri
3	Kecamatan Arjasa	Moh. Ilyas
4	Kecamatan Balung	Sofiyullah
5	Kecamatan Bangsalsari	Moh. Bustan
6	Kecamatan Gumuk Emas	Biqi Huzairin
7	Kecamatan Jelbuk	Mohammad Haikal
8	Kecamatan Jenggawah	Yusuf Ansori
9	Kecamatan Jombang	Agus Solehuddin
10	Kecamatan Kalisat	Rahmad Aminuddin
11	Kecamatan Kaliwates	Muhlisin
12	Kecamatan Kencong	Bahruzzain
13	Kecamatan Ledokombo	Laras Sukmawati
14	Kecamatan Mayang	Eko Setiawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15	Kecamatan Mumbulsari	Abdul Wafi
16	Kecamatan Pakusari	Moh. Subaidi
17	Kecamatan Panti	Salamul Huda
18	Kecamatan Patrang	Lukman Hakim
19	Kecamatan Puger	Selfia Zuraidah
20	Kecamatan Rambipuji	Tanto Wijaya
21	Kecamatan Semboro	Rofiki Ramdani
22	Kecamatan Silo	Syamsul Arifin
23	Kecamatan Sukorambi	Gusdi Rofiki
24	Kecamatan Sukowono	Mahfuddin
25	Kecamatan Sumberbaru	Bahruddin Ali wafa
26	Kecamatan Sumberjambe	Ahmad Baydawi
27	Kecamatan Sumbersari	Sutresno
28	Kecamatan Tanggul	Zainuri
29	Kecamatan Tempurejo	Alimuddin
30	Kecamatan Umbulsari	Eka Puspita Sari
31	Kecamatan Wuluhan	Mohmammad Munip

Sumber: Data Sayap 30 Kabupaten Jember

C. Partisipasi Relawan Sayap 30 pada Pemilihan Bupati Jember 2016-2021

Demokrasi pada umumnya menganggap bahwa partisipasi masyarakat yang lebih banyak akan membuat demokrasi yang ada semakin lebih baik. Dalam implementasinya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Partisipasi warga menekankan pada partisipasi langsung warga dalam setiap tindakan politik. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukkan yang sangat berharga. Partisipasi politik dapat dilakukan pada saat pesta demokrasi berlangsung yaitu umumnya pada saat pemilihan kepala daerah. Pada saat itu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mulai berkampanye memberikan janji-janji politik kepada masyarakat. Partai politik dan kandidat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perseorangan berlomba mengeluarkan janji-janji politik sebagai strategi kampanye untuk mendapatkan dukungan politik dalam Pemilu. Janji-janji politik bertujuan membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah secara umum mendukung dengan berbagai dimensinya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu.

Akan tetapi setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan menduduki jabatannya, mereka sering lupa dengan janji-janji politik yang pernah mereka berikan kepada masyarakat. Pada akhirnya masyarakatlah yang dirugkan dan kecewa ketika mereka tidak menepati janji atau melaksanakan janji politiknya yang pernah mereka janjikan. Untuk merespon kegelisahan-kegelisahan yang terjadi dalam masyarakat, maka di kabupaten Jember dibentuk sebuah asosiasi di luar pemerintahan untuk mengawal janji-janji politik pemerintah supaya terealisasi secara maksimal dan tepat sasaran. Asosiasi ini bernama Relawan Sayap 30, seperti apa yang dikemukakan oleh bapak Muhammad Muslim tentang tujuan terbentuknya relawan relawan sayap 30.

> "Pertama, ya karena munculnya kegelisahan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan mas, yang jarang sekali oleh kepemimpinan bupati sebelumnya, seperti jalan di desa-desa yang masih jauh dari harapan masyarakat, dan masyarakat menganggap bupati sebelumnya itu hanya selesai dijanji mas. Selain itu gini mas, Jember ini kan luas dan APBD yang pemerintah turunkan bagi kami masyarakat itu tidak cukup mas, apalagi pengawasan dalam penggunaan anggaran desa itu tidak ada mas. Sedangkan pasar-pasar tradisional jauh dari pedesaan yang menurut kami pemerintah hanya menyediakan bagi orang-orang kecamatan, dan kami masyarakat yang di desa kurang diperhatikan, dari situlah saya secara pribadi punya inisiatif untuk membentuk sebuah organisasi yang nantinya bisa mengawal bupati terpilih, biar gak hanya tidur dan senang-senang aja mas, berhubung background saya adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> aktifis dari salah satu organisasi maka saya membentuk relawan yang juga pengalaman dalam berorganisasi mas.[2]

Di dalam pertarungan Pilkada, janji-janji politik kerap dicap sebagai arena kotor, karena pemerannya kerap umbar janji. Janji diumbar untuk meraih kekuasaan, tetapi dilupakan begitu saja setelah kekuasaan digenggam. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat sekiranya janji-janji yang diucapkan oleh kandidat sebelum pemilihan bisa direalisasikan setelah kandidat itu terpilih. Masyarakat bisa mengawal dan mengingatkan manakala janji-janji itu terlupakan.

Dalam politik praktis, seringkali politisi menjadikan visi sebagai *lipservices* (buah bibir) tanpa makna baik bagi perubahan ke hidupan masyarakat. Visi-misi hanya dijadikan sebagai senjata sesaat untuk meraih simpati rakyat. Seringkali visi-misi yang diusung hanya disusun begitu saja tanpa kajian mendalam, pertimbangan rasional, dan tidak berdasarkan data-data riil yang terkait dengan kehidupan masyarakat dan pembangunan. Visi-misi disusun sepihak oleh para politisi, gagasan dan idenya belum tentu searah dengan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran dari visi itu.

Tidak adanya aturan baku yang mengatur bahwa para kandidat yang terpilih harus menunaikan janji politiknya saat kampanye, membuat masyarakat tidak memiliki wewenang untuk menuntut janji-janji politik yang telah dijanjikan. Saat kandidat yang terpilih tidak melaksanakan janjinya, masyarakat tidak bisa memaksakan agar janji tersebut dipenuhi. Sehingga kandidat terpilih cenderung mengabaikan apa yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk

[2] Wawancara dengan Bapak Mohammad Muslim (Pendiri Relawan Sayap 30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawal janji politik para pemimpin adalah dengan memanfaatkan peran relawan untuk mengawal janji-janji politik yang telah disampaikan pada saat mereka kampanye.

Relawan yang terorganisir diharapkan mampu membenahi kondisi – kondisi sosial politik yang tidak mapan, tidak memuaskan, penuh konflik dan disharmoni. Maka menjadi penting adanya sebuah pendidikan politik bagi para relawan politik. Relawan politik yang berkumpul dalam sebuah asosiasi akan mempermudah pendidikan politik bagi individu agar dia bisa menjadi partisipan politik yang berkualitas tinggi dan bertanggung jawab secara moril terhadap sesama manusia, lingkungan hidup, dan Tuhan Yang Maha Kuasa.[3]

Pendidikan politik bagi para relawan berguna untuk memfungsikan dengan baik kekuasaan yang disandang dan belajar memberikan kontrol serta pengawasan terhadap proses-proses politik sebagai hak asasi kewarganegaraannya. Selain itu, pendidikan politik juga berguna untuk memaksimalkan partisipasi politik para relawan tepat pada alurnya. Sebab partisipasi politik bukan sekedar berupa inkasasi atau perolehan secara otomatis informasi politik dan data tentang situasi dan kondisi masyarakat saja, tetapi ia juga mencakup beberapa hal seperti, penentuan sikap sendiri, mampu melakukan seleksi dan refleksi secara kritis, bisa memberikan pengaruh politik, dan berbuat politik secara aktif dalam proses pembangunan politik.[4]

Sedangakn makna dari Relawan adalah orang yang rela, bersedia tanpa syarat, untuk melakukan aktivitas tertentu. Relawan adalah orang yang bekerja

---

[3] Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, 126
[4] *Ibid.*, 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan semangat pengabdian dan karenanya mereka bekerja mengabdikan dirinya tanpa pamrih. Mereka bekerja tanpa tendensi kepentingan. Kalaupun kepentingan tersirat, itu kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak mohammad muslim.

> "Ya kalau itu pasti ada kepentingan, tapi bukan kepentingan pribadi, melainakan kepetingan kelompok atau masyarakat yang percaya kepada kami tentang sikap kami yang dari awal sudah konsisten unuk memperjuangkan dan mengawalnya sampai akhir jabatan mas. Berbeda dengan relawan yang lain setelah manang ditinggalkan. Ya enak yang menang langsung pesta. Kita kan tidak begitu".[5]

Karna bagaimanapun pada umumnya Politik hampir identik dengan kepentingan. Adagium-adagium politik sudah jelas, misalnya dalam politik tak ada kawan yang abadi, tak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Hal ini menggambarkan betapa kepentingan itu melekat dalam politik. Adagium lain mengatakan, dalam politik, *"there is no such thing as a free lunch"*, tak ada yang namanya makan siang gratis. Itu berarti hampir mustahil jika berpolitik tanpa kepentingan, termasuk mendukung kegiatan politik seseorang yang sedang berpolitik, tanpa kepentingan tertentu. Kepentingan dalam politik bisa bermacam-macam, bisa saja berupa harta (uang) atau juga tahta (kekuasaan, jabatan). Dan ditegaskan lagi oleh bapak Mohammad muslim bahwa didalam relawan sayap 30 murni adalah kepentingan masyarakat luas.

> "Kalau saya pribadi tidak dapat apa-apa mas. Berbeda dengan tim relawannya lawan kita. Ibu Faida itu bukan orang kaya raya mas. Ya memang punya salah satu rumah sakit di Jember sini, akan tetapi rumah sakitnya kecil. Jadi kita lihat-lihat lah. Cuman saya berpesan pada bapak wakil bupati kalau jadi jangan lupakan temen-temen relawan begitu mas. Kalau berupa jabatan ya gak ada."[6]

---

[5]Wawancara dengan bapak Mohammad Muslim (Pendiri Relawan Sayap 30)
[6] Wawancara dengan bapak Mohammad Muslim (Pendiri Relawan Sayap 30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini peneliti menemukan fakta bahwa pesan yang disampaikan oleh bapak Muhammad Muslim terhadap wakil bupati tentang tim relawan sayap 30 jangan sampai dilupakan ketika menang seakan-akan menimbulkan politik yang tersembunyi segingga membuat peneliti mencari berbagi sumber tentang peran relawan sayap 30 apakah benar-benar murni ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat atau hanya mengamankan posisi bupati untuk priode selnjutnya atau ada hal lain yang diharapakan dari semua itu.

D. Bentuk Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji politik Dr. Faida dan KH. Muqit Sebagai Bupati Jember 2016-2021.

Dalam tata pemerintahan yang baik, konsep partisipasi diyakini sebagai suatu pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberhasilan dari pemerintahan yang demokratis, penyelenggaraan bangunan yang berorientasi kerakyatan dan terciptanya keadilan sosial. Pilihan ini mengandung konsensi dengan menguatkan partisipasi masyarakat disatu sisi dan disisi lain pemerintah harus berperan sebagai wahana untuk masyarakat yang berbeda atau saling bertentangan. Menurut tokoh Mardikanto dan Poerwoko Soebianto partisipasi didefinisikan sebagai keikutsertaan seorang atau kelompok anggota masyarakat dalam satu kegiatan.

Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa politik tidak bisa disebut sebagai perkara individual yang berdiri sendiri, ia merupakan peristiwa dalam komunikasi, peristiwa kolektif, dalam kebersamaan dan dalam situasi konflik. Untuk pemecahannya kemudian dilakukan aksi bersama untuk melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendobrakan terhadap kepastian nasib peruntungan dan sikap-sikap fatalistik, penghapusan kompleks inferior, emosi-semosi ketidak mampuan dan menyerah kalah, serta mencari jalan keluar dari impasse dan jebakan-jebakan hambatan disusul dengan mencari alternatif-alternatif pemecahannya.[7] Maka dari itu muncullah ide atau gagasan dari masyarakat jember yang di wakili oleh relawan sayap 30 tentang pentingnya peran relawan atau masyarakat untuk mengawal kepemerintahan yang baik, sejalan dengan apa yang dikemukaka oleh bapak selamet salah satu pengurus relawan sayap 30.

> "Relawan Sayap 30 tidak sama dengan relawan pada umumnya mas.. Kebanyakan relawan membubarkan diri setelah pemilihan selesai kan. Namun sayap 30 terus melilibatkan hingga saat ini. Relawan ini membantu dr. Faida dan mengawal janji-janji kampanye. tidak hanya pada saat pemilihan tapi juga setelahnya untuk mengawal kepemimpinan dr. Faida. Relawan ini dilibatkan dalam proses realisasi janji politik yang telah dikampanyekan, agar dalam pelaksanaannya, janji politik yang telah disampaikan tepat sasaran. Maksud tepat sasaran itu berpihak kepada masyarakat Jember secara keseluruhan.. ya sampean kan orang Jember sampean lihat aja nanti. Kira-kira dampaknya bagaimana.. "[8]

Dari sinilah muncul kegelisahan dari masyarakat Jember khususnya tim relawan sayap 30 untuk membangun pemimpin yang terus memperhatian janji-janjinya yang telah memenangkan di Pilkada Jember, maka dari itu bapak selamet selaku kordinator sayap 30 mengintruksikan terhadap tim-timnya yang berada di setiap kacamatn terus memantau seberapa besar berjalannya janji-janji politik dari Dr. Faida dan KH. Muqit. Dengan adanya pengawalan itu bapak Selamet terus berkordinasi dengan bupati Jember melalui jalur kedekatan emosionalnya

[7] Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, 129
[8] Wawancara dengan Kordinator Sayap 30 Bapak Selamet pada Tanggal 10 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga terus terjadi komunikasi yang inten agar tidak ada kesalah pahaman antara relawan Sayap 30 dan bupati terpilih dan bisa benar-benar sesuai dengan cita-cita awal bahwa janji itu dibuat bukan hanya retorika saja akan tetapi berdampak secara nyata bagi masarakat Jember.

1. Bentuk Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Kinerja Pemerintahan Jember

Adapun partisipasi atau pengawalan relawan Sayap 30 sebegai berikut:

a. Diadakannya rapat internal antara bupati Dr. Faidah dan KH. Muqit bersama tim relawan untuk menentukan dan merealisasikan janji-janji yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Jember.
b. Berkomunikasi dengan kepala Desa se-kabupeten Jember oleh tim relawan sayap 30.
c. Tim relawan terjun langsung ke masyarakat untuk memastikan apakah program yang telah di realisasikan itu mempunyai dampak atau membantu apa yang dibutukah oleh masyarakat Jember.
d. Mengawal setiap program yang mau direalisasikan terhadap kepala desa dan RT/RW se-kabupaten Jember.
e. Bekerja sama dengan para mahasiwa di Jember dengan turun kebawah untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang masuk dalam program kerja bupati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Janji-janji Politik Yang Terealisasi

NO	JANJI POLITIK BUPATI	TEREALISASI
1.	Pembagian ambulance disetiap desa seluruh kabupaten Jember	150 Ambulance
2	Pemberian 5000 beasiswa S1	1500 Mahasiswa
3	Pendidikan Gratis ditingkat SD,SMP,SMA atau sederajat	60% terealisasi
4	Bantuan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),	40% terealisasi
5	Revitalisasi pasar tradisional	35% terealisasi
6	Insentif guru ngaji	13.500 Guru ngaji
7	Memberikan dukungan industri wisata dan kreatif	Terealisasi
8	kemudian pemberian asuransi kesehatan gratis.	150.000 masyarakat yang kurang mampu
9	Meningkatkan akses pondok pesantren	Terealisasi
10	Meningkatkan honor RT dan RW	Terealisasi
11	Pengembangan seni budaya,	Terealisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12	Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di kota sampai pelosok desa	Terealisasi
13	serta persiapan peningkatan bandara Notohadinegoro menjadi bandara embarkasi haji yang pengembangannya mendapat suntikan pendanaan dari APBN senilai Rp380 milliar.	Terealisasi
14	Merevitalisasi Puskesmas dan Puskesdes	Terealisasi
15	Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan	Terealisasi
16	Menjadikan Jember sebagai bumi shalawat yang ramah lingkungan	Terealisasi

Senada apa yang disampaikan oleh bupati jember ketika sosialisasi honorer guru ngaji di Desa manggisan. Pada Tahun 2018 dan selanjutnya. program kerja kami akan semakin dikerucutkan menjadi lima bidang utama yang akan diprioritaskan, sehingga 22 janji kerja mudah-mudahan bisa dituntaskan tahun ini" ucap bupati perempuan pertama di Jember itu.

Kelima bidang yang mendapat prioritas yakni "Jember Maju Iptek dan Imtaq", "Jember Mandiri", "Jember Sehat", "Jember Kuat dan Bersih", serta "Jember

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Wisata Berbudaya", sehingga dengan fokus lima bidang utama program kerja itu akan menuntaskan seluruh program kerja yang dicanangkan di tahun 2018.

"Agar seluruh program kerja yang akan dilaksanakan bisa berjalan sesuai harapan, kami minta seluruh lapisan masyarakat ikut berperan serta mengawasi jalannya pembangunan, sehingga masyarakat bersatu padu untuk mendukung program kerja yang berpihak kepada rakyat," katanya.

Bupati berpesan kepada camat, lurah, dan kepala desa untuk tidak ragu dalam menyampaikan visi misi pemerintah karena masyarakat memerlukan informasi yang jelas, bukan informasi yang tidak berimbang maupun menyesatkan.

"Pemberian informasi tersebut bagian dari upaya memberikan edukasi masyarakat untuk mendukung perubahan yang dijalankan pemerintah Faida - Muqiet, sehingga camat, lurah, maupun kades untuk tidak ragu mewujudkan 22 janji kerja, tanpa harus melihat semasa kampanye berseberangan," ujarnya.[9]

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya

[9] https://jatim.antaranews.com/berita/246538/22-janji-kerja-bupati-faida-wabup-muqit-dituntaskan-tahun-2018 diakses pada tanggal 08 februari 2019. Jam 19.30. WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Dengan adanya komunikasi yang terus berjalan maka peniliti disini menemukan perkembangan demokrasi berkemajuan melalu relawan Sayap 30, berbeda sekali dengan relawan-relawan yang pada umumnya yang hanya memfokuskan kemenangan satu calon saja dan melupakan semua janji-janji yang telah mereka janjikan. Karena pada dasarnya, 'Politik adalah jalan kesejahtraan' karena sebagian besar kegiatan politik dilakukan dengan pembicaraan sebagai salah satu bentuk komunikasi jalan kesejahtraan. Sebaliknya 'komunikasi kesejahtraan masyarakat adalah politik' karena hampir semua komunikasi bertujuan mempengaruhi sebagai salah satu dimensi politik. Justru itu dapat dirumuskan bahwa komunikasi politik adalah "pembicaraan yang bertujuan mempengaruhi dalam kehidupan bernegara".[10] Dan menimbulkan adanya pekembangan yang terus berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat Jember.

E. Dampak yang Dirasakan oleh Masyarakat Jember dengan Adanya Pengawalan Terhadap Realisasi Janji Politik oleh Sayap 30

Pengertian dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbutan seseorang. Jadi dampak adalah

[10] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu keadaan dimana ada hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dari sini peneliti langsung meninjau apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat Jember terhadap adanya relawan Sayap 30 khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesehatan ataupun infrastruktur yang ada di kabupaten Jember. Dan jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bpk. Solihin (Dsn. Bedahan Jerit, Ds. Curah Kalong, Kec. Bangsalsari) beliau menyampaikan adanya kepuasan kepada Bupati untuk menyalurkan programnya terhadap masyarakat Jember sehingga dampaknya begitu dirasakan. Akan tetapi kurang maksimal karena kurangnya komunikasi antara Kades dan relawan sehingga program yang sudah berjalan kurang maksimal.

> "alhamdulillah ambulan disini yang dikasih pemerintah itu sudah turun sekarang itu mas… Cuman masih kurang tepat sasaran.. dan itu rumahnya yang megang ambulan jauh dari kantor desa mas, jadi kalo ada orang sakit di sini *pancet* pakek mobilnya pak tenggi (kepala desa), seharusnya kan taruk dikantor kepala desa mas, biar mudah kalo ada perlu mas"[11]

Kenyataannya berbeda dengan daerah lain, sebagian besar rakyat tidak lagi memandang penting kampanye bahkan Pemilu itu sendiri karena hal ini dianggap tidak lebih dari sekedar rutinitas lima tahunan belaka yang belum pasti akan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kehidupan mereka. Terjadinya penurunan secara beruntun partisipasi masyarakat dalam setiap gelaran Pemilu di era Reformasi merupakan bukti konkretnya. Bahkan, dalam konteks Pilkada. Di

[11] Wawancara dengan Bpk. Solihin (Dsn. Bedahan Jerit, Ds. Curah Kalong, Kec. Bangsalsari) Tanggal 25.11.2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa daerah jumlah suara golput justru lebih besar daripada suara kemenangan pasangan calon.

Alasan mendasar yang melatar-belakangi munculnya kekecewaan masyarakat tersebut akibat janji Pemilu yang tak kunjung pernah menjadi kenyataan. Rakyat mulai sadar dan merasa hanya dibutuhkan suaranya saat Pemilu, selanjutnya diabaikan ketika kekuasaan telah tercapai.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bpk Sukarna (Dsn. Gelangpaci, Ds. Gelang, Kec. Sumberbaru)

> "disini tu ada mas sering nyurvei guru ngaji kata orang itu relawan mas, tapi kurang tepat sasaran mas, mosok tiap hari kerjanya nguli dikebon karet tiap malem jadi guru ngaji, ada juga tu mas santrinya yang cuma dua dapat, sedang santrinya yang agak banyak tidak dapat mas, ini juga guru anak saya tidak dapat apa-apa dari pemerintah. Ya Alhamdulillah program dulu waktu ibu kampanye mau memberikan honor kepada guru ngaji sudah terlakasana meskipun kurang ngenak mas."[12]

Berbicara dampak jelas sudah kami sebutkan di atas bahwa dampak ada dua yang pertama dampak positif dan dampak negatif, apa lagi berbicara dampak relawan politik. Disini peneliti betul-betul mencari sumber yang betu-betul independen agar apa yang diutuhkan untuk memenuhi tulisan ini benar-benar valid sesuai fakta.

Karena janji kampanye para kontestan Pemilu seolah-olah hanya menjadi pemanis bibir semata untuk mengelabui rakyat agar tertarik memilih dirinya, padahal dari semula sebagian janji tersebut telah direncanakan untuk tidak dipenuhi. Maka tidak heran bila sebagian besar rakyat menganggap janji politik

[12]Wawancara dengan Bapak Sukarna (Dsn. Gelangpaci, Ds. Gelang, Kec. Sumberbaru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat identik dengan kebohongan. Pemilu dimata rakyat tidak lebih dari sekadar sebuah ajang tempat orang memberikan janji-janji untuk diingkari.

Akibatnya, demokrasi perwakilan di Indonesia saat ini mengalami masalah *disconnected electoral* yaitu adanya keterputusan relasi antara wakil dengan yang diwakili. Sehingga seringkali tindakan yang dilakukan oleh para wakil tidak linier dengan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan dari orang-orang yang diwakili (publik).

Jika janji itu dibiarkan begitu saja maka yang akan terjadi hanya janji yang hanya selesai ketika kampanye, untuk selanjutnya tidak ada perkembangan yang berdampak terhadap masyarakat. Untuk itu relawan sayap 30 terus melakukan tahap demi tahap program kerja bupati Jember seperti apa yang kami temui di lapangan ketikan mendatangi bapak Subeidi.

> "kemaren saya dikasih tau relawan, terus disuruh ngumpul ke kantor kepala desa dan dibawa ke puskesmas kecamatan untuk pemberian kartu KIS, jadi menurut saya ya itulah dampaknya mas, baguslah bagi orang yang kurang mampu mas, apalagi sekarang mahal biaya rumah sakit mas. Apalagi disini sangat desa,,, memang kartu itu sangat dibutuhkan,,, karna saya tidak ikut BPJS mas, gak tau caranya daftar mas."[13]

Selama ini masyarakat hanya pasrah ketika hanya disuapi kebohongan karna bagi masyarakat Janji politik tidak bersifat mengikat. Pemberi janji tidak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi janjinya. Ia bisa saja – dan memang seringkali – mengingkari janji. Sang pemberi janji juga tidak bisa dituntut secara hukum. Rakyat yang telah mendengar dan percaya pada janji politik tidak bisa

[13] Wawancara dengan Bpk Subeidi (Dsn. Sumbersari, Ds. Panti, Kec. Rambipuji) Tanggal 04.12.218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaporkan seseorang yang telah memberi janji kepada aparat penegak hukum ataupun otoritas lainnya.

Rakyat tidak akan bisa menyeretnya untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan janjinya itu. Rakyat memang berhak menagih janji, tetapi pemberi janji juga memiliki hak untuk memberi jawaban ataupun sekadar membangun “alibi” agar tak mau dicap pembohong. Janji adalah dusta dan dusta memang telah menjadi bagian inheren dalam politik. Lagi, Pilkada selalu berkorelasi dengan dusta politik.

Namun demikian, janji selalu berdampak etis-moral. Janji selalu berkaitan dengan hati nurani. Jika demikian, janji yang diberikan kepada rakyat mestinya diwujud-konkritkan. Meskipun tidak memiliki kewajiban hukum, tetapi seseorang yang memberikan janji memiliki kewajiban etis-moral untuk memenuhinya.

Berbeda dengan relawan sayap 30 mereka sadar betul bahwa adanya sebuah janji maka relawana harus mengawalnya, bukan hanya mementingkan kepuasan secara kelompok atau pribadi kalau ingin demokrasi di Indonesia ini lebih memberikan dampak yang positif.

Adapun dampak dari partisipasi relawan sayap 30 sebagai berikut:

1. Jember Maju Iptek dan Imtaq
2. Jember Mandiri
3. Jember Sehat
4. Jember Kuat dan Bersih
5. serta Jember Kota Wisata Berbudaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad syafi. (ketua RT. Dusun Pelalangan Des. Darungan. Adanya dampak yang dirasakan oleh beberapa RT tentang berjalannya program bupati yang dikawal oleh relawan sayap 30.

> "iyaa sama sih. Cuman sekarang alhamdulillah gaji sudah tidak repot ngambilnya dan sudah naik gaji saya yang awalnya 150 menjadi 200 dan sudah tidak pernah telat lagi.. Tiap bulan sudah cair terus gaji saya.. Tinggal ke ATM *wes* ambil itu aja.. Alhmdulillah enak lah… Ya dampaknya saya siap disuruh apa saja sekarang mas. Ya dampaknya bupati yang bagus sekarang ini mas..dan dampaknya relawan ibuk bupati juga.. Karna dulu waktu kampanye kami para RT se desa Darungan ini usul ke relawan kalau bisa naikan gaji dan tidak telat kami siap memilih bupati begitu..dan yang membuatkan rekening dulu para relwannya ibuk bupati.[14]

Dengan adanya pengawalan dan komunikasi yang terus dilakukan oleh para relawan sayap 30 dampaknya begitu dirasakan oleh bapak Muhammad Syafi'i sebagai ketua RT, sehingga untuk memberikan program kelanjutan untuk masyarakat Bapak Syafi'i menyampakan akan siap dan semangat untuk tugas yang sudah diwacanakan oleh bupati Faida dan Kh. Muqit untuk pembagian sertifikat tanah di wilayah Jember yang belum ada sertifikatnya.

Begitu juga menurut bapak Kulsum Efendi selaku Kades Darungan, bahwa adanya peran relawan sayap 30 benar-benar membantu masyarakat Jember khususnya yang dirasakan oleh masyarakat desa Darungan.

> " alhamdulillah mas dengan adanya relawan sayap 30 ini benar-benar membantu apa yang dibutuhakan masyarakat Darungan sepertihalnya keluhan mobill ambulan yang sebelum-sebelumnya masyarakat terpencil di dusun Pelalangan dan gunung Bukek desa Darungan ini dan medan jalannya yang rusak parah hampir 15 kilo mas.. yang jauh dari perkotaan atau puskemas kecamatan, sehingga ketika ada orang yang sakit ingin pergi ke puskesmas disini masih nunggu mobil untuk diantarkan, kadang pakai mobil saya sampai-sampai ada yang dibawak

[14] Wawancara dengan Bapak Muhammad syafi.(ketua RT. Dusun Pelalangan Des. Darungan.) Tanggal 10.12.2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pakek motor *wes* jalannya licin kadang pas musim hujan kasihan mas.. Dengan adanya keluhan masyarakat relawan sayap 30 langsung berkomunikasi dengan bupati untuk lebih awal merelisasikan janji-janji Dr. Faida yang ingin memberikan ambulan di desa Darungan ini"[15]

Menurut bapak Kulsum selaku kepala desa Darungan dengan adanya relawan Sayap 30 ini benar-benar membantu apa yang dibutuhakan masyarakat Jember sepertihalnya keluhan mobil ambulan yang sebelum-sebelumnya masyarakat terpencil di desa Darungan ini dan medan jalannya yang jauh dari perkotaan atau puskemas kecamatan, sehingga ketika ada orang yang ingin pergi ke puskesmas disini masih nunggu mobil untuk diantarkan, dengan adanya keluhan masyarakat relawan sayap 30 langsung berkomunikasi dengan bupati untuk lebih awal merelisasikan janji-janji Dr. Faida yang ingin memberikan ambulan di setiap desa se-kabupaten Jember. Berbeda yang disampaikan bapak Muhammad holily selaku kepala desa manggisan.

> "relawan Sayap 30 ini sebenernya sebagai apa diposisi di pemerintahan dek.. Kenapa begitu semangatnya gitu lho.. untuk melakukan program-program yang sudah dijanjikan oleh Dr. Faida, apakah memang untuk membantu masyarakat atau membantu Dr. Faida karna kalau membantu Dr. Faida itu urusan lain..tapi kalau emang benar-benar mengawal ya bagus lah mas..berarrti di Jember ini kedepannya insyaallah bagus…klau urusan mengawal ya seperti mencari guru ngaji yang berhak mendapatkan honor setiap tahun itu sudh berjalan..dan kalau urusan tepat sasaran saya kurang tahu..sampean tanyak langsung aja ke masarakat mas..masyarakat sini enak-enak kok"[16]

Berbeda apa yang di kemukakan oleh kades Manggisan, peneliti menelusuri desa-desa lain. Peneliti langsung menemui bapak Muhammad Holili beliau mengatakan bahwa relawan Sayap 30 ini sebenernya sebegai apa diposisi di pemerintahan kenapa begitu semangatnya untuk melakukan program-program

---

[15] Wawancara dengan Bapak Kulsum Efendi Kades Darungan Tanggal 3 September 2018
[1616] Wawancara dengan Muhammad Holili Kades Manggisan Tanggal 4 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah dijanjikan oleh Dr. Faida. Dan disini peneliti mulai menemukan makna apa yang dikemukakan oleh pendiri relawan sayap 30 bahwa memang ada kepentingan kelompok yang mana sudah disadari oleh masyarakat Jember. Tapi setidaknya ada pengawalan terhadap janji-janji waktu kampanye dan benar-benar terealisasi secara keseluruhan dalam satu priode ini.

Dan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kepala desa Curah Kalaong yang melihat kurangnya partisipasi yang dilakukan oleh tim relawan Sayap 30 yang hanya menunggu seperti halnya masyarakat lain.

> "adanya Relawan Sayap 30 tidak begitu Efektif disini mas.. karena koordinator yang berada di kecamatan Bangsalsari ini tidak begitu memperhatikan apa yang diinginkan atau yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Desa Curah Kalong ini, untuk komunikasi ke saya sih sebagai kepala Desa tetap inten cuman lebih sering hanya komunikasi saja, namun ketika ditanyak program Ibuk bupati yang paling dekat jawabannya selalu menunggu intruksi dari atas, ini seakan-akan koordinator yang disini menunggu bola jadi saya kurang puas..tapi masalahanya kan tidak bisa diganti..karena relawan itu yang berjuang waktu kampanye untuk kemenagan ibuk Faidah"

Adapun pendapat yang kami wawancarai melalui kepala desa Curah Kalong bapak Suhaimi Irfami dampak adanya Relwan Sayap 30 tidak begitu Efektif karna koordinator yang berada di kecamatan Bangsalsari tidak begitu memperhatikan apa yang diinginkan atau yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Desa Curah Kalong sehingga komunikasi terhambat. untuk komunikasi ke kepala Desa tetap inten cuman lebih sering hanya komunikasi saja, namun ketika diminta program Ibuk bupati yang paling dibutuhkan oleh masyarakat jawabannya selalu menunggu intruksi dari atas, ini seakan-akan kordinator yang didesa Curah Kalong menunggu intruksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Hutington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Dan ketika peneliti mempertanyakan kinerja relawan sayap 30 dari sudut pandang wakil rakyat (DPRD) bapak masrur.

> "gini dek…. Masyarakat Jember itu sudah jenuh mengadu ke kepala desa atau struktur pemerintah kabupaten Jember, iya memang mereka itu mendengarkan tapi tidak diperhatikan semaksimal mungkin, jadi saya kira adanya relawan Sayap 30 bisa menjadikan masyarakat lebih diperhatikan juga lebih didengarkan, jadi saya sangat setuju dengan adanya organisasi ini dek, dengan harapan bisa jadi jembatan antara keluhan masyarakat dan pemerintah kabupaten Jember. Masalah ini dibenarkan atau tidak bagi anggota DPR yang lain termasuk saya tidak ada masalah,,, yang terpenting adalah masyarakat makmur dan sejahtera. Kalau urusan ada udang dibalik peran mereka ya itu wajar-wajar saja.."[17]

Dan ketika kami menemui salah satu DPR Jember Drs.H. Masrur,M.Si dari partai Hanura beliau hanya menyampaikan masyarakat Jember sudah mulai jenuh terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya, sehingga kesadaran situ muncul dari tim relawan Sayap 30 untuk mengawal janji-janji politik Dr, Faida. Menurut beliau itu tidak melanggar undang-undang meskipun dalam struktur sudah sangat lengkap untuk melakukan program-program yang sudah diwacanakan.

Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin memberikan definisi singkat mengenai partisipasi

[17] Wawancara dengan DPR Kabupaten Jember Drs. H. Masrur,M.Si dari fraksi Hanura Tanggal 30 Agustus 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik sebagai bentuk keikut-sertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya dan itu sah-sah saja tidak ada larangan yang mengatur dalam undang-undang .[18]

Adapun dampak program yang dikawal oleh relawan Sayap 30 yang dirasakan oleh masyarakat Jember kami rangkum sebagai berikut:

1. Adanya Ambulans di setiap desa se-Kabupaten Jember 50% sudah terealisasi.
2. Pemberian honor guru ngaji dan dibuatkan rekening untuk pengambilan honor disetiap tahunnya serta peningkatan sebesar 3 (tiga) kali lipat honor guru mengaji dan bantuan untuk guru PAUD.
3. Pemberian asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji.
4. Adanya pemberian kartu KIS kepada masyarakat yang kurang mampu.
5. Pemberian honor sekaligus dibuatkan rekening kepda seluruh RT/RW se-kabupten Jember.
6. Pemberian beasiswa kepada anak guru ngaji.
7. Pembenahan infrastuktur dengan melakukan pengaspalan, memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi hingga ke pelosok desa.
8. Pemberian layanan kesehatan gratis untuk masyarakat dan operasi gratis bagi Duafa.

Namun ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh pemerintah Jember hususnya dalam penerapan atau penyusunan APBD agar tidak terjadi seperti tahun 2018 yang tarik ulur antara DPRD dan pihak Pemkab Jember sehingga prioritas untuk menyelesaikan 22 janji/program tidak berjalan.

[18] Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Nomer 3, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengutip dari Radar Jember Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Jember 2019 sudah disepakati. Hasilnya, terlihat kekuatan APBD Jember cukup tinggi yakni senilai Rp 3,62 Triliun. Ini belum ditambah nantinya dengan sisa lebih penggunaan anggaran 2018 dari APBD 2018 yang tidak terserap tahun ini.

Nilai ini diketahui dari hasil rapat paripurna penetapan nota pengantar KUA PPAS APBD Jember 2019 tadi pagi. “Ini sesuai dengan hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif pada 17 Juli 2018 kemarin,” ucap Ayub Junaidi, Wakil Ketua DPRD Jember yang memimpin rapat paripurna penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD Jember 2019 tadi.

Berdasarkan penyampaian pimpinan DPRD Jember disampaikan kekuatan anggaran APBD Jember 2019 yakni target pendapatan mencapai Rp 3,62 Triliun. Pendapatan ini diperoleh dari pendapatan perimbangan senilai Rp 2,38 T. “Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 630,6 miliar,” papar Ayub dalam rapat kemarin.

Ditambah dengan pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp 611,4 miliar. Namun dalam pendapatan ini juga ada nilai pembiayaan daerah yang direncanakan senilai Rp 172,7 miliar. Dengan demikian, pendapatan ini nantinya akan dimanfaatkan Pemkab Jember di tahun 2019 mendatang. Baik untuk pembiayaan rutin maupun pembangunan di Jember selama setahun kedepannya.

“Perencanaan untuk belanja langsung senilai Rp 1,262 triliun. Sedangkan belanja tidak langsung Rp 1,06 triliun,” jelas Ayub kemarin. Dimana untuk belanja wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan dasar senilai Rp 2,232 triliun dan belanja wajib non pelayanan dasar Rp 256 miliar.[19]

Berdasarkan dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat Jember dengan adanya pengawalan terhadap realisasi janji-janji politik bupati Faida 2016-2021 oleh relawan Sayap 30, masyarakat Jember merasakan bahwa ada perkembangan kesejahteraan masyarakat Jember. Ditambah lagi karena APBD kabupaten Jember yang ditujukan untuk belanja pelayanan dasar/publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat kabupaten Jember.

> "APBD Kabupaten Jember harus secara konsisten diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan agar mampu memecahkan persoalan-persoalan sosial yang mendasar, terutama pengangguran dan kemiskinan, serta mempertahankan stabilitas ekonomi,"

Karena itulah, sesuai apa yang dikemukakan oleh Dr. Faida menjelaskan APBD Kabupaten Jember dalam setiap tahunnya harus tetap ditujukan untuk belanja pelayanan dasar/publik yang berorientasi pada rakyat, sebagai upaya mencapai sasaran untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh masyarakat Jember.

[19] https://radarjember.jawapos.com/2018/07/23/kekuatan-apbd-jember-2019-mencapai-rp-362-triliun/ diakses pada tanggal 08 februari 2019 jam 20.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang Partisipasi Relawan dalam Pemerintahan Daerah (Studi Tentang Partisipasi Relawan Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021), dapat kami simpulkan:

1. Relawan Sayap 30 adalah relawan politik yang terbentuk di kabupaten Jember untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yaitu dr. Faida dan KH. Muqit dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember 2016-2021. Relawan Sayap 30 tidak hanya berperan sebagai tim pemenangan dr. Faida dan KH. Muqit dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember 2016-2021, melainkan juga ikut serta dalam pengawalan terhadap realisasi janji-janji politik dr. Faida dan KH. Muqit sebagai bupati Jember 2016-2021.
2. Pengawalan yang dilakukan oleh relawan Sayap 30 terhadap realisasi janji politik dr. Faida dan KH. Muqit ialah:
   a. Mengikuti rapat realisasi janji politik dengan dr. Faida dan KH. Muqit
   b. Melakukan pemantauan dan pendataan terhadap daerah-daerah sebelum pengimplementasian program.
   c. Mengawal pelaksanaan program yang dilakukan.
   d. Mengevaluasi program yang telah dilaksanakan.

   Sebagian masyarakat kabupaten Jember merasakan dampak positif atas pengawalan relawan Sayap 30 terhadap realisasi janji politik dr. Faida dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Muqit. Namun masih ada sebagian masyarakat yang belum puas karena relawan tidak bisa memastikan secara pasti program yang akan dilaksanakan dan hanya menunggu instruksi dari bupati.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait Partisipasi Relawan dalam Pemerintahan Daerah (Studi Tentang Partisipasi Sayap 30 dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021):

1. Relawan Sayap 30 harus mengevaluasi kinerjanya terhadap pengawalan janji politik, karena sebagian masyarakat masih belum merasakan buntuk pengawalan yang dilakukan oleh Sayap 30 terhadap realisasi 22 janji politik bupati Jember 2016-2021.
2. Relawan Sayap 30 dan pemerintah kabupaten Jember harus memperjelas hubungan atau kontrak yang dilakukan oleh keduanya untuk menghindari *abuse of power* dan meminimalisir praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983).

Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Jainuri, dkk. *Catatan Politik Ditahun Politik.* (Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, 2014).

Kartono, Kartini. *Pendidikan Politik; Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Cet-III, Desember. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

Mardikanto, Totok. dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Mas'oed, Mochtar. *Negara, Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Meloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996).

Scumpeter, Joseph. *Capitalism, Socialism, and Democracy* (New York: Harper, 1947).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kualitati dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2008).

Suhendar, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program PNPM Mandiri* (Skripsi Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang, 2012).

Skripsi:

Aida, Nur. "Keterlibatan Komunitas pada Pilkada di Kabupaten Soppeng Tahun 2015" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

Sinulingga, Arimbi. "Peranan Relawan Demokrasi Terhadap Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Deli Serdang" (Skripsi tidak diterbitkan, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2014).

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember (Kamis, 13 Desember 2018, 19.00).

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Nomer 3, 2017

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Kulsum Efendi Kades Darungan Tanggal 3 September 2018.

Wawancara dengan Bapak Mohammad Muslim (Pendiri Relawan Sayap 30).

Wawancara dengan Bapak Muhammad syafi. (ketua RT. Dusun Pelalangan Des. Darungan.) Tanggal 10.12.2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara dengan Bapak Sukarna (Dsn. Gelangpaci, Ds. Gelang, Kec. Sumberbaru.

Wawancara dengan Bpk Subeidi (Dsn. Sumbersari, Ds. Panti, Kec. Rambipuji) Tanggal 04.12.218.

Wawancara dengan Bpk. Solihin (Dsn. Bedahan Jerit, Ds. Curah Kalong, Kec. Bangsalsari) Tanggal 25.11.2018.

Wawancara dengan DPR Kabupaten Jember Drs. H. Masrur,M.Si dari fraksi Hanura Tanggal 30 Agustus 2018.

Wawancara dengan Kordinator Sayap 30 Bapak Selamet pada Tanggal 10 September 2018.

Wawancara dengan Muhammad Holili Kades Manggisan Tanggal 4 September 2018.

Wawancara dengan Tim Relawan Sayap 30 Bapak Fathurrosi,SE pada tanggal 16 Desember 2017.

Wawancara dengan Tim Relawan Sayap 30 Bapak Nuhasan,SPd.I pada tanggal 21 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id